BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhir-akhir ini banyak orang membicarakan masalah krisis kepemimpinan. Konon sangat sulit mencari kader-kader pemimpin pada berbagai tingkatan. Reformasi dilakukan untuk mewujudkan aparatur negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam memberantas praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan pelayanan yang prima sebagaimana diharapkan oleh masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia diwarnai oleh ketidakpercayaan masyarakat kepada aparat pemerintah. Hal ini sudah menjadi kebutuhan khusus dari masyarakat Indonesia untuk menerapkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga seorang pemimpin pemerintahan dapat berjalan dengan lebih baik.

Berangkat dari hal tersebut, selama ini masyarakat sering memandang negatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan, karena berbagai perilaku yang kurang simpatik dan lebih cenderung bersikap sebagai penguasa daripada pelayan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, serta kurangnya komunikasi dan koordinansi antara pemerintah dengan masyarakat. Berbanding terbalik dengan hal tersebut, sebuah pemerintahan yang dinilai baik adalah pemerintahan yang

dikembangkan atas dasar prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas, partisipasi, responsivitas, kesamaan di muka hukum, keadilan, dan orientasi pada konsensus. Oleh sebab itu, salah satu tuntutan di era reformasi ini adalah membicarakan memiliki pemimpin yang dapat menciptakan dan menerapkan *good governance*, dimana pemerintah mampu melayani masyarakat secara baik, menciptakan suasana yang memungkinkan kreativitas masyarakat berkembang dan mampu mengatasi masalah-masalah dalam masyarakat secara arif dan bijaksana, sehingga masyarakat semakin merasa dilindungi oleh pemimpinnya.

Hal ini tentunya menjadi pelajaran yang cukup berharga bagi pemerintahan disemua tingkatan, baik pemerintahan pusat, daerah, maupun desa. Akan tetapi, dalam hal ini penulis lebih memfokuskan kepada pemerintahan desa. Hal ini dikarenakan bahwa masyarakat desa mengaku belum merasakan pelayanan secara baik dari pemerintahan desa, terutama tentang penerapan prinsip-prinsip *good governance* untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik seperti yang diharapkan oleh masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Karena pemerintahan desa berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan tersebut terdiri atas pelayanan publik, pelayanan pembangunan, dan pelayanan perlindungan.

Selain itu, untuk menciptakan pemerintahan desa yang dapat mengelola tata pemerintahan yang baik (*good governance*), seorang pemerintah desa perlu memperhatikan kesejahteraan perangkat desa lainnnya, seperti BPD, dan lembaga

kemasyarakatan lainnya . Hal ini dapat diperbaikan dari segi sistem penggajian yang selayaknya dan pola rekrutmen dalam jabatan harus dibenahi, untuk mengubah sistem birokrasi yang selama ini cenderung birokratis, inefisien, lamban, sering menyalahgunakan wewenang, serta penuh korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) menuju pemerintahan yang lebih fleksibel, efisien, cepat, akuntabilitas, dan bersih.

Sehubungan dengan pernyataan di atas, pola hubungan yang selama ini menempatkan atasan dan bawahan sebagai suatu tingkatan yang kaku serta kurangnya komunikasi antar pemerintah desa itu sendiri, otomatis akan menyebabkan kurangnya koordinasi atau saling kerjasama atasan dan bawahan. Pemerintahan yang seperti ini harus dirubah dalam pemerintah desa untuk tetap mendapatkan kepercayaan dari masyarakat desa sebagai tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dewasa ini, kualitas pelayanan (seperti pembuatan E-KTP, Pengurusan KK, pembagian raskin, pengurusan surat-surat keterangan serta kepentingan lainnya) yang diberikan pemerintah desa mengalami penurunan dan perlu diadakan perbaikan, bila dilihat dari sisi efisiensi dan efektivitas, responsivitas, kesamaan perlakuan (tidak diskriminatif), sehingga pelayanan yang diberikan pemerintah desa masih jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat dan masih memiliki berbagai kelemahan. Dengan adanya hal ini, diharapkan kepada pemerintah desa untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* sehingga mampu mengatasi masalah-masalah dalam masyarakat secara arif dan bijaksana guna terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang

"Persepsi masyarakat Tentang Pelaksanaan *Good Governance* Oleh Pemerintah Desa di Desa Simarmata Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir".

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan sejumlah masalah yang berhasil ditarik dari uraian latar belakang yang akan diteliti dalam lingkup permasalahan yang lebih luas dibandingkan perumusan masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dalam penelitian ini mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kepercayaan masyarakat desa terhadap pemerintah desa.
2. Kurangnya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa terhadap masyarakat desa, seperti pengurusan E-KTP, pengurusan KK, pembagian raskin, dan pengurusan surat-surat keterangan lainnya, seperti surat berkelakuan baik dan surat keterangan tidak mampu.
3. Pemerintah cenderung bersifat penguasa, sehingga menjadikan batas antara pemerintah dengan masyarakat desa.
4. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa dengan perangkat desa lainnya.
5. Persepsi masyarakat tentang pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* oleh pemerintah desa di Desa Simarmata.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah mutlak dilakukan dalam setiap penelitian, agar penelitian lebih terarah. Untuk lebih memudahkan penulisan dalam

menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini adalah, Persepsi masyarakat tentang pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* oleh pemerintah desa di Desa Simarmata Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir.

D. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena perumusan masalah adalah inti dari seluruh permasalahan yang telah diidentifikasi terlebih dahulu. Dengan demikian, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana persepsi masyarakat tentang pelaksanaan *good governance* oleh pemerintah desa di Desa Simarmata Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir?

E. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, dan perumusan masalah maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk Mengetahui persepsi masyarakat tentang penerapan prinsip-prinsip *good governance* oleh pemerintah desa di Desa Simarmata Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir.

F. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitan, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, untuk memperluas wawasan berfikir penulis, kususnya tentang tata pemerintahan yang baik (*good governance*) .

2. Bagi pemerintah desa, sebagai bahan masukan dan pemikiran dalam menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di Desa Simarmata Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir.
3. Bagi masyarakat, sebagai bahan masukan bagi masyarakat dalam menanggapi pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* oleh pemerintah desa dan diharapkan dapat menambah informasi ataupun pengetahuan tentang tata pemerintahan yang baik.
4. Bagi mahasiswa, sebagai bahan masukan dalam meneliti masalah yang sama pada lokasi dan sampel yang berbeda.

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY